

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan adalah permasalahan umum yang dihadapi oleh setiap negara. Tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum yang terkendala karena kemiskinan merupakan indikator penting bagi pembangunan ekonomi terutama negara sedang yang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan terjadi tatkala kekayaan suatu negara tidak terdistribusi dengan adil kepada warga negara. Sebagian warga negara mempunyai banyak aset, namun sebagiannya terjebak dalam lingkaran kemiskinan (Yulhendri, 2009). Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Indikasi dari kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan seperti ketidaktersediaannya air bersih, gizi buruk, rendahnya pendidikan, banyaknya pengangguran dan lain-lain. Permasalahan kemiskinan diberbagai negara, khususnya negara sedang berkembang, telah menarik perhatian khusus bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan berkomitmen menghapus kemiskinan melalui program Sustainable Development Goals (SDG). Program tersebut

dijabarkan ke dalam 17 poin pokok yang ingin dicapai pada tahun 2030, yaitu : tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi yang baik dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jika dilihat dari segi ekonomi penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Masalah kemiskinan ini sangat kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah- masalah pengangguran, pendapatan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Menurut Todaro (2012) permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi yakni persoalan yang apabila tidak diatasi maka hal ini akan mempengaruhi atau memunculkan masalah baru yang menyangkut banyak aspek sebab berhubungan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, dan tingkat kesehatan yang rendah. Kemiskinan menjadi masalah yang mendasar ataupun hal yang menjadi permasalahan utama di setiap negara didunia, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut word bank (2004) menyebutkan salah satu faktor terjadinya kemiskinan yaitu karena adanya pendapatan yang rendah serta aset untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, minuman,

tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap provinsi di Indonesia masing-masing mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda berdasarkan dari kondisi demografis, hingga kebijakan daerahnya masing-masing termasuk di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kemiskinan mengalami penurunan, namun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah tidak berpengaruhnya Indeks Pembangunan Manusia terhadap penurunan tersebut. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa, angka kemiskinan di Sumatera Utara secara umum terjadi fluktuasi turun naik dalam jumlah maupun persentase pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) fluktuasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak serta dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Todaro (2003) mengatakan bahwa pembangunan manusia menjadi peranan kunci dalam

pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Mazumdar (2003) menyatakan bahwa untuk kondisi di masa sekarang dan jangka panjang ekonomi saja tidak cukup untuk peningkatan kualitas hidup manusia di setiap negara. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor penting di kehidupan manusia. Salah satu indikator yang dapat mencakup ketiga sektor tersebut dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia pertama kali dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 (UNDP, 2011; BPS, 2018). Indeks tersebut mengukur pembangunan suatu daerah melalui beberapa faktor, yakni umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka harapan sekolah, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat dalam membeli sejumlah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Secara umum IPM berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM penduduk maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Sedangkan hubungan IPM dengan kondisi ekonomi pada umumnya juga berhubungan positif. Artinya semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin tinggi IPM. Fakta hubungan IPM dengan kondisi ekonomi berpengaruh positif

sedangkan IPM dan tingkat kemiskinan berhubungan negatif di ungkap oleh beberapa peneliti terdahulu.

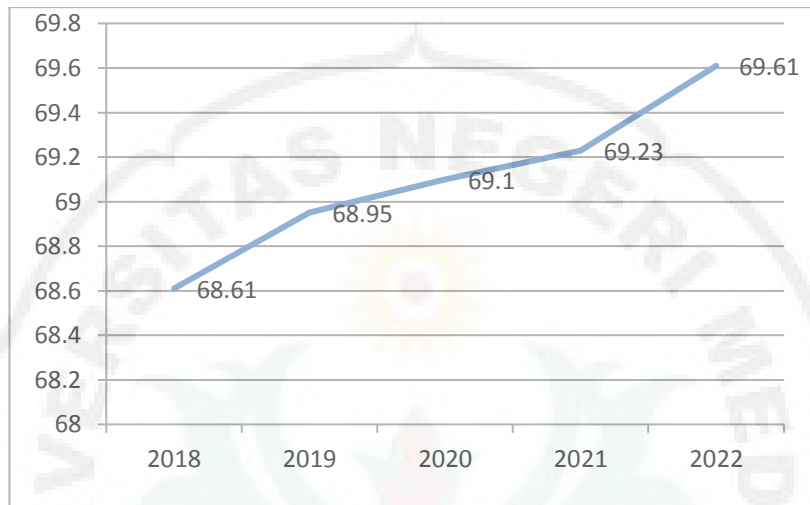
Kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah (Lismawati, 2007). Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. IPM yang merupakan tolak ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut.

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah- masalah pengangguran, pendidikan, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Artinya, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. Kemiskinan adalah masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangat lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan merupakan masalah

kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda (Nurwati 2008).

Indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia memiliki andil dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. Kualitas hidup manusia yang baik akan menjadi faktor pendukung rendahnya jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka akan memperlihatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang yang semakin baik. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia. pada saat ini kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan rendah, hal ini dapat terlihat dengan sangat jelas di Provinsi Sumatera Utara. Contohnya dalam hal pendidikan, masih banyaknya orang yang wajib belajar namun tidak bersekolah. Masalah tersebut disebabkan karena biaya pendidikan yang mahal serta fasilitas dan pemerataan pendidikan yang kurang memadai. Rendahnya tingkat IPM akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja dari masyarakat. Dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan beberapa langkah-langkah untuk mencapainya yaitu diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut Mulyadi (2012) peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yakni melalui pembangunan pendidikan yang dibarengi dengan pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan dengan cara menumbuhkan budaya hidup sehat serta kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri, sedangkan untuk

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kualitasnya dapat dilaksanakan dengan memberikan keterampilan praktis.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara

Dilihat dari grafik diatas, rata-rata IPM Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 68,61% ditahun 2018, 68,95% di tahun 2019, 69,10% ditahun 2020, di tahun 2021 69,23% dan 69,61 ditahun 2022. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, terlihat bahwa data IPM seluruh Kabupaten/Kota dan data rata-rata Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori yang menjelaskan jika semakin tinggi nilai IPM maka semakin rendah angka kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa IPM tidak terlalu berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena pemerataan pembangunan manusia yang masih rendah. Kesenjangan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) antarwilayah pasti

akan memengaruhi capaian IPM secara keseluruhan. Sepanjang provinsi atau kabupaten/kota dengan nilai IPM rendah tidak didorong untuk mempercepat peningkatan kualitas manusia melalui sejumlah indikator yang diukur dalam IPM, maka capaian daerah lain yang tinggi jadi kurang bermakna.

Ketimpangan IPM tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga antarkabupaten/kota dalam provinsi. Kesenjangan yang tinggi terjadi di Papua. Dalam IPM Papua 2020, karena IPM 2021 per provinsi belum dipublikasikan semua, IPM Kota Jayapura mencapai 79,94 atau kategori tinggi. Namun, IPM Kabupaten Nduga di tahun yang sama hanya 31,55 atau selisih 48,39 poin. Kesenjangan IPM antarkabupaten/kota itu terjadi di semua provinsi. Dari data IPM 2020, daerah pedalaman, kepulauan, pesisir, perbatasan atau jauh dari ibu kota provinsi umumnya memiliki IPM terendah di provinsi tersebut. Sementara secara nasional, nilai IPM terkecil didominasi provinsi di kepulauan Maluku, Nusa Tenggara (kecuali Bali), dan Papua. Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan serta dosen Departemen Geografi dan Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sukamdi, menambahkan, kesenjangan IPM antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota dalam provinsi bukan hal baru. Tren ini sudah terjadi sejak perhitungan IPM hingga tingkat kabupaten atau kota dilakukan di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia juga berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada.

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian suatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan permintaan akan barang dan jasa, artinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga secara tidak langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dihitung menggunakan pendapatan nasional (Sukirno, 2011:49). Tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung dapat dihitung dari data pendapatan nasional riil yang tersedia. Nainggolan dkk (2005:79) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita yang memperhatikan dua hal, yaitu output total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Mankiw (2006:19) menjelaskan perlunya peduli dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu karena negara dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih besar dapat menyediakan perawatan kesehatan yang lebih baik, menyediakan sistem pendidikan yang lebih baik, dan dapat mengukur kemampuan negara untuk mendapatkan hal-hal yang menyusun sebuah hidup yang berarti.

Salah satu tolok ukur pertumbuhan suatu negara dapat dilihat dari GDP (Gross Domestic Product) yang merupakan statistika perekonomian yang paling

diperhatikan karena dianggap ukuran terbaik mengenai kesejahteraan rakyat. Hal yang mendasarinya karena GDP dapat mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua penduduk dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil perekonomian. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Gambar 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara

Pada Grafik diatas terlihat bahwa rata-rata PDRB Sumatera Utara (Milyar Rupiah) mengalami perubahan naik turun disetiap tahun nya, dimana pada tahun 2018 yaitu sebesar 512.762,63, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 539.513,85 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 533.746,36 milliar rupiah kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 556.835,87 milliar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 582.032,78 milliar rupiah. Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi naik turun, hal ini selaras dengan data kemiskinan yang mengalami fluktuasi naik turun. Namun peningkatan PDRB ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan masih tingginya ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Peningkatan PDRB tidak diikuti dengan meratanya distribusi pendapatan di Sumatera Utara. Ketimpangan ini dapat dilihat dari kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi

suatu wilayah juga disebabkan adanya pengangguran, dimana ketika pengangguran meningkat maka pendapatan suatu negara akan menurun. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi (yang berkualitas) diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan.

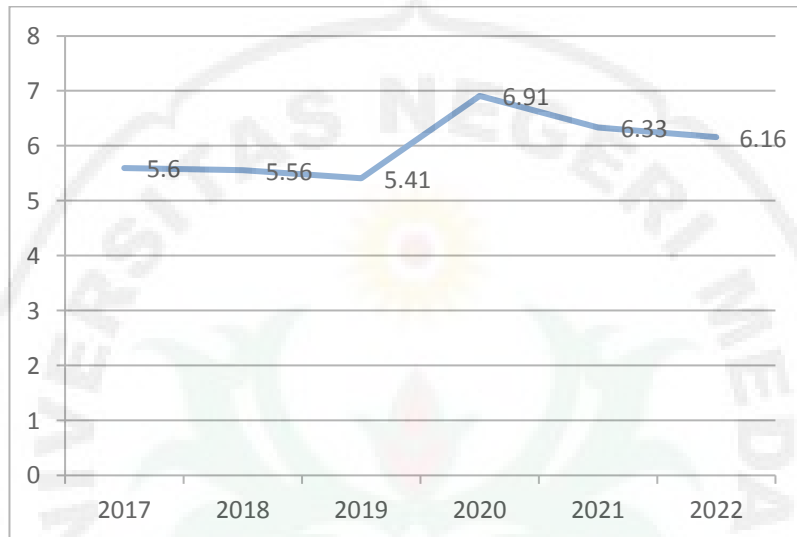
Indikator lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu tingkat pengangguran. Pengangguran memiliki hubungan yang cukup erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, semakin tinggi angka pengangguran maka akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu masalah pengangguran harus segera diselesaikan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran suatu daerah dapat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka daerah tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja serta menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sukirno (1997) menyebutkan bahwa pengaruh jelek dari pengangguran yakni dapat membuat pemasukan masyarakat menjadi kurang dan dapat mengurangi level kesejahteraan yang telah diperoleh pada akhirnya. Menurunnya kemakmuran masyarakat karena pengangguran dapat dipastikan bisa menaikkan peluang terjebaknya dalam masalah kemiskinan karena tidak adanya pemasukan. Jika pengangguran dalam sebuah negara sangat buruk, ketidaknyamanan politik

dan sosial selalu muncul dan mengakibatkan pengaruh buruk bagi kemakmuran masyarakat dan peningkatan ekonomi dalam waktu jangka panjang. Untuk masyarakat dalam kelompok besar, yang tidak memiliki akses pekerjaan tetap atau hanya paruh-waktu, mereka akan selalu berada dalam bagian masyarakat yang sangat miskin.

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan sangat erat, seseorang yang menganggur tentu tidak mempunyai penghasilan. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran tersebut ditemukan di beberapa negara. Kajian yang mendukung teori ini dilakukan di Nigeria dengan menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut menurun, Osinubi (2005). Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran ialah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Langkah pertama untuk mengurangi pengangguran ialah dengan mengakui bahwa pengangguran bukanlah akibat seseorang yang malas, melainkan masalah struktural. Menurut Brotherhood (2002) Hal ini berarti pemerintah mempunyai peran dalam menetapkan kebijakan yang sesuai. Jika pemerintah melakukan investasi dalam penyediaan lapangan

kerja, hal ini tidak hanya akan menjaga stabilitas perekonomiannya, namun juga akan menciptakan banyak kesempatan bekerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Gambar 1.3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara

Grafik diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat pengangguran di Sumatera Utara mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 sebesar 5,10 dan tahun 2019 sebesar 4,39 lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,58%, lalu pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 4,17% dan mengalami kenaikan kembali menjadi 5,51 tahun 2022. Meningkatnya jumlah pengangguran di Sumatera Utara dapat di picu dari beberapa faktor seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), banyaknya angkatan kerja baru sedangkan jumlah kebutuhan kerja tidak bertambah atau faktor lainnya seperti dampak Covid-19 yang melanda di Indonesia.

Dari uraian diatas terlihat bahwa fenomena fluktuasi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara masih cukup tinggi dibandingkan dengan 33 provinsi di Indonesia dan beberapa provinsi di Sumatera Utara. Selain itu, kemiskinan tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk serta peningkatan kesempatan kerja. Dampak kemiskinan terhadap perekonomian sangat merugikan dan untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa :

1. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi yang artinya banyak faktor yang menyebabkan fluktuasi tersebut.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan secara terus menerus. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan, tidak terjadi kesesuaian antara data dengan teori yang artinya faktor IPM tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
3. Produk Domestik Bruto (PDRB) dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi naik turun. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan, terjadi kesesuaian antara data dengan teori yang artinya PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

4. Tingkat pengangguran dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi naik turun. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan, terjadi kesesuaian antara data dengan teori yang artinya pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi dan memperdalam penelitian, penulis memperkecil cakupan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan secara simultan di Provinsi Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat di tulis tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti terkait isu-isu yang dibahas, khususnya mengenai dampak IPM, PDB dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan serta merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan.
2. Bagi masyarakat, sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan dan dipahami untuk menambah wawasan dikalangan masyarakat umum.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan Ilmu Pengetahuan dan wawasan bagi Mahasiswa terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait IPM, PRDB dan Tingkat Pengangguran.